



Analisis Kebijakan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Dermaga Kereng Bangkirai: Tinjauan Regulasi, Partisipasi Komunitas dan Pelestarian Ekosistem Gambut Sabangau

Varel^{1*}, Christian Veraldo Nugroho², Elia Wulandari³, Orda Sasa⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: farelnuel12@gmail.com

Abstract. *The post-pandemic recovery of Indonesia's tourism sector has spurred a significant shift towards sustainable tourism, establishing Community-Based Ecotourism (CBET) as a vital approach for high-value conservation areas. This research analyzes CBET policy development at Dermaga Kereng Bangkirai, Palangka Raya, Central Kalimantan, by integrating three dimensions: the effectiveness of local government regulations, community participation via Pokdarwis, and the ecological implications for the Sebangau National Park peatland ecosystem. Utilizing a qualitative library research method, the study synthesizes secondary data including regulations, accredited journals, and official reports from 2020–2026 through content and thematic analysis. Findings reveal three structural challenges: regulatory disharmony between local revenue targets and national conservation mandates; CBET participation remaining in a transitional phase where Pokdarwis involvement is limited to pragmatic economic interests; and latent ecological threats, such as hydrocarbon pollution and habitat disturbance, arising from insufficient mitigation instruments. The study highlights the urgent need for integrated policy engineering that harmonizes tourism, community empowerment, and peatland ecosystem preservation. These findings provide a strategic framework for stakeholders, ultimately contributing to the achievement of Sustainable Development Goals (SDG) 8 and SDG 15.*

Keywords: *Community-Based Ecotourism; Kereng Bangkirai; Peatland Ecotourism; Sebangau National Park; Sustainable Tourism Policy.*

Abstrak. Pemulihan sektor pariwisata Indonesia pascapandemi COVID-19 mendorong pergeseran paradigma menuju pariwisata berkelanjutan, menjadikan ekowisata berbasis masyarakat (*Community-Based Ecotourism/CBET*) sebagai pendekatan yang semakin relevan, khususnya di kawasan konservasi bernilai ekologis tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Dermaga Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan mengintegrasikan tiga dimensi kajian secara terpadu, yaitu efektivitas regulasi pemerintah daerah, pola partisipasi komunitas lokal melalui Pokdarwis, dan implikasi ekologis terhadap ekosistem gambut Taman Nasional Sebangau. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang mengandalkan data sekunder dari dokumen regulasi, jurnal ilmiah terakreditasi SINTA dan Scopus, serta laporan kelembagaan resmi yang diterbitkan pada periode 2020–2026. Analisis dilakukan melalui dua teknik saling melengkapi, yaitu analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen kebijakan dan analisis tematik (*thematic analysis*) terhadap literatur ilmiah. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga tantangan struktural utama: disharmoni regulasi antara target Pendapatan Asli Daerah dan mandat konservasi nasional, partisipasi CBET yang masih berada pada fase transisi dengan keterlibatan Pokdarwis yang terbatas pada dimensi ekonomi pragmatis, serta ancaman ekologis laten berupa pencemaran hidrokarbon dan gangguan habitat satwa endemik akibat minimnya instrumen mitigasi. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya rekayasa kebijakan terpadu yang mengharmonisasikan kepentingan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian ekosistem gambut sebagai kontribusi terhadap pencapaian SDG 8 dan SDG 15.

Kata Kunci: Ekowisata Berbasis Masyarakat; Ekowisata Gambut; Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan; Kereng Bangkirai; Taman Nasional Sebangau.

1. LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata Indonesia saat ini mencatat pemulihan yang sangat signifikan pascapandemi COVID-19, seiring dengan dorongan strategis pemerintah untuk bertransformasi dari pariwisata massal menuju pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan rilis data historis dari Badan Pusat Statistik (2024), tingkat kunjungan wisatawan di Indonesia

mengalami tren lonjakan drastis secara konsisten sejak pelonggaran akses internasional pada tahun 2022 hingga awal 2024, sebuah indikator yang menunjukkan pemulihan sektor pariwisata secara solid dan melampaui ekspektasi awal pemerintah. Pemulihan dan pertumbuhan ini menjadi momentum emas bagi sektor ekowisata. Berbagai studi terbaru menegaskan bahwa tren pariwisata pascapandemi telah bergeser; ekowisata kini memperlihatkan tingkat resiliensi dan tren pertumbuhan yang jauh lebih positif dan adaptif apabila dibandingkan dengan pariwisata massal konvensional (Purnomo et al., 2020). Pendekatan ekowisata dinilai sangat krusial karena diyakini mampu mengintegrasikan upaya pelestarian ekologi dengan pemberdayaan taraf ekonomi komunitas lokal secara bersamaan (Putri et al., 2022).

Dalam bingkai pariwisata berkelanjutan tersebut, konsep *Community-Based Ecotourism* (CBET) atau ekowisata berbasis masyarakat hadir sebagai pendekatan yang dinilai paling inklusif dan partisipatif. Rumangkit et al., (2024) menegaskan bahwa dengan memadukan elemen konservasi ekologi, pemberdayaan taraf ekonomi, dan pelibatan masyarakat lokal secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, CBET dapat menumbuhkan rasa kepemilikan kultural komunitas terhadap sumber daya alam yang mereka kelola. Lebih lanjut, aspek sosial yang mencakup pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal, serta kematangan aspek lingkungan seperti tata kelola aksesibilitas destinasi, merupakan determinan utama keberhasilan CBET (Putri et al., 2022). Dengan demikian, CBET tidak hanya berfungsi sebagai model wisata alternatif, melainkan sebagai wujud strategi pembangunan holistik yang sangat membutuhkan sokongan kebijakan publik yang adaptif dan terpadu.

Implementasi konsep tata kelola pariwisata berbasis masyarakat ini menemukan relevansi praktisnya di Dermaga Kereng Bangkirai, sebuah destinasi yang terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Wilayah ini memegang peranan geopolitik dan ekologis yang krusial sebagai pintu gerbang utama menuju Taman Nasional Sebangau, yang merupakan satu-satunya taman nasional di Indonesia dengan lanskap ekosistem hutan rawa gambut tropika seluas kurang lebih 568.700 hektare (Balai Taman Nasional Sebangau, 2025). Berkat inisiatif kolektif dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat, kawasan yang pada awalnya sekadar difungsikan sebagai fasilitas bekas latihan dayung dan bongkar muat ini berhasil bertransformasi menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan daerah. Magnet utama destinasi ini bertumpu pada fenomena alami ekosistem air hitam di perairan Sungai Sebangau, di mana masyarakat lokal kini mengelola ragam aktivitas wisata ekologis yang bernilai ekonomi, salah satunya adalah atraksi susur

sungai menggunakan kapal motor menuju habitat satwa endemik (Kristiana & Nathalia, 2021). Di balik potensi kepariwisataannya yang bernilai ekonomi tinggi, kawasan perairan dan hutan rawa ini menyimpan fungsi ekologis yang amat sangat kritis bagi keseimbangan iklim regional maupun global. Ekosistem gambut Sebangau yang memiliki kedalaman hingga 12 meter berfungsi vital sebagai kawasan penyangga alami bagi tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Kalimantan Tengah, yaitu Sungai Katingan, Sungai Kahayan, dan Sungai Sebangau (Balai Taman Nasional Sebangau, 2025). Walaupun luasan lahan gambut sangat terbatas secara global, kemampuannya dalam melakukan sekuestrasi dan menyimpan cadangan karbon jauh melebihi kapasitas hutan non-gambut biasa, menjadikannya elemen kunci dalam skema mitigasi perubahan iklim nasional. Realitas ekologis ini menuntut agar instrumen kebijakan pariwisata yang diterapkan sangat berhati-hati, mengingat degradasi lingkungan akibat aktivitas antropogenik yang tak terkendali merupakan ancaman terbesar bagi kelestarian kawasan konservasi (Purnomo et al., 2020).

Sebagai instrumen jaminan dan pedoman operasional tata kelola, pengembangan ekowisata di Dermaga Kereng Bangkirai mutlak memerlukan harmonisasi payung hukum yang kuat antara regulasi daerah dan nasional. Secara hierarkis, fondasi penyelenggaraan pariwisata nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mengamanatkan bahwa pembangunan pariwisata harus berasaskan keberlanjutan serta menjunjung tinggi kearifan lokal dan kelestarian alam. Di tingkat daerah, pedoman ini dijabarkan lebih lanjut melalui regulasi pemerintah Kota Palangka Raya terkait tata ruang dan kepariwisataan. Namun, mengingat lokasi Dermaga Kereng Bangkirai yang bersinggungan langsung dengan area pelestarian alam, aktivitas pariwisata di kawasan ini juga terikat secara yurisdiksi pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.423/Kpts-II/2004 mengenai penetapan kawasan Taman Nasional Sebangau. Keberadaan landasan regulasi berlapis ini wajib disinkronkan guna mencegah aktivitas komersial wisata melampaui batas toleransi pelestarian ekologis kawasan gambut. Meskipun kawasan ekowisata ini memiliki legalitas formal dan kekayaan ekologis yang diakui secara nasional, implementasi lapangannya masih berkuat dengan sejumlah permasalahan mendasar, khususnya menyangkut dimensi partisipasi akar rumput. Beberapa penelusuran studi terdahulu mendapati bahwa meskipun ada perputaran roda ekonomi dari ekowisata Kereng Bangkirai, inisiatif pemberdayaan dan manajemen komunitas di kawasan ini masih membutuhkan intervensi strategis dan peningkatan kapasitas yang lebih masif dari pemerintah daerah (Kristiana & Nathalia, 2021). Ketertinggalan partisipasi masyarakat yang substantif sering kali berkorelasi dengan kurangnya ruang negosiasi yang responsif terhadap aspirasi komunitas lokal dalam fase krusial perencanaan tata kelola destinasi

(Rachmawati & Fitriyani, 2024). Minimnya akses keterlibatan komprehensif tersebut pada akhirnya berisiko menghambat terbentuknya komitmen sosiokultural secara utuh, padahal rasa kepemilikan merupakan motor penggerak utama dalam menjaga keberlangsungan pariwisata berbasis masyarakat (Kaharuddin et al., 2020).

Permasalahan pada dimensi partisipasi masyarakat tersebut menjadi semakin rumit apabila dihadapkan pada kebuntuan birokrasi di tingkat perumusan kebijakan struktural. Pengelolaan sektor pariwisata yang bersinggungan langsung dengan zonasi konservasi di Indonesia kerap kali tertahan oleh benturan regulasi sektoral dan minimnya harmonisasi antara hukum kelestarian lingkungan hidup dan kebijakan perolehan manfaat ekonomi komersial (Nugroho & Syahrudin, 2021). Selain itu, sering terjadi distorsi interpretasi regulasi antara instansi pemerintah daerah sebagai peraup retribusi kawasan wisata dengan regulasi pemerintah pusat yang menjaga ketat tata ruang kawasan konservasi (Rumangkit et al., 2024). Bagi Dermaga Kereng Bangkirai, keselarasan antara kepentingan pemungutan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan kepatuhan mutlak terhadap aturan zonasi taman nasional menuntut adanya rekayasa kebijakan administratif yang komprehensif.

Meninjau problematika yang ada, literatur-literatur akademik sejauh ini masih menunjukkan celah penelitian (research gap) yang substansial. Eksplorasi akademis mengenai ekowisata di Dermaga Kereng Bangkirai dominan berfokus pada analisis sosiologis dan narasi deskriptif partisipatif, namun belum banyak menyentuh evaluasi tingkat kebijakan publik secara mendalam. Secara nasional, mayoritas riset dengan tema CBET masih lebih banyak menyoroti objek wisata desa agraris maupun wisata bentang bahari, sedangkan dinamika kebijakan ekowisata di lanskap ekosistem gambut tropis yang memiliki spesifikasi tata kelola yang sangat teknis dan unik masih menjadi wilayah studi yang marginal (Rumangkit et al., 2024). Sampai saat ini, amat jarang ditemukan elaborasi literatur yang menjahit secara utuh hubungan antara efektivitas partisipasi warga lokal, kelembagaan regulasi daerah, dan kerentanan kelestarian rawa gambut ke dalam satu kerangka analisis komprehensif. Berangkat dari kekosongan pangkalan literatur tersebut, penelitian ini memfokuskan tujuannya pada proses analisis kebijakan publik yang melingkupi tata kelola ekowisata di Dermaga Kereng Bangkirai melalui pendekatan studi literatur yang sistematis. Secara operasional, sesuai dengan arah tujuan kajian, penelitian ini digerakkan oleh satu rumusan masalah tunggal yang komprehensif, yaitu: “Bagaimana analisis kebijakan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (*Community-Based Ecotourism/CBET*) di Dermaga Kereng Bangkirai melalui studi literatur yang mengintegrasikan aspek regulasi pemerintah daerah, pola partisipasi komunitas lokal, dan dampaknya terhadap pelestarian ekosistem gambut Sebangau?” Rumusan

masalah tunggal ini dirancang agar telaah berbagai dokumen kebijakan dan literatur empiris mampu menghasilkan diagnosis tata kelola yang holistik, multidimensi, serta memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang tepat sasaran.

Urgensi dari pelaksanaan kajian ini bersandar pada komitmen penuntasan agenda pembangunan makro, sekaligus sebagai sumbangsih literasi kebijakan administrasi negara. Pada tatanan global, rumusan dalam riset ini berkontribusi merespons mandat *Sustainable Development Goals* (SDGs), utamanya pada pencapaian SDG 8 mengenai ketahanan ekonomi lokal dan SDG 15 mengenai penjagaan kelestarian ekosistem daratan. Dari sisi akademis, riset ini didedikasikan untuk menjembatani dan memperluas khazanah ilmu administrasi publik dan manajemen kebijakan ekowisata berkelanjutan, terutama untuk mengisi diskursus akademik mengenai perumusan tata kelola di wilayah penyangga konservasi gambut tropis. Kontribusi praktis kajian ini diproyeksikan dapat diadopsi sebagai instrumen evaluasi dan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, Balai Taman Nasional Sebangau, dan Pokdarwis Kereng Bangkirai dalam memandu perumusan intervensi tata kelola destinasi yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan inklusif di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Ecotourism/CBET)

Ekowisata berbasis masyarakat atau *Community-Based Ecotourism* (CBET) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan komunitas lokal sebagai subjek utama sekaligus penerima manfaat dari seluruh aktivitas wisata alam. Dalam kerangka CBET, pengelolaan sumber daya alam diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan secara sinergis. Rumangkit et al. (2024) menegaskan bahwa CBET yang efektif mensyaratkan adanya ekosistem tata kelola (*governance ecosystem*) yang kokoh, yang mencakup manajemen lingkungan, orientasi kewirausahaan berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi *smart tourism* sebagai katalis daya saing destinasi.

Konsep CBET tidak dapat dipisahkan dari prinsip keberlanjutan tiga dimensi: ekonomi, sosial-budaya, dan ekologis. Saputra (2025) mengidentifikasi bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata khususnya di kawasan gambut tidak cukup hanya digerakkan oleh perolehan ekonomi semata. Keberlanjutan ekowisata di kawasan sensitif mutlak menuntut integrasi aspek sosial, seperti pelestarian kearifan lokal, serta komitmen terhadap tata ruang ekologis secara komprehensif. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi destinasi seperti Dermaga Kereng Bangkirai, yang kekayaannya ekologisnya (ekosistem gambut,

orangutan, dan air hitam Sungai Sebangau) serta kearifan budaya Dayak setempat menjadi modal sosial-ekologis yang tak tergantikan.

Teori Partisipasi Masyarakat dalam Ekowisata

Partisipasi masyarakat merupakan variabel sentral yang menentukan kualitas tata kelola ekowisata. Waluyo et al. (2025) menegaskan bahwa mewujudkan ekowisata yang sehat dan berkelanjutan menuntut keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan, yang pada gilirannya akan membentuk ketahanan komunitas (*community resilience*) dan komitmen yang nyata terhadap keberlanjutan destinasi. Kaharuddin et al. (2020) lebih lanjut mengembangkan perspektif dinamis terhadap partisipasi, dengan memetakan pergeseran polanya melintasi tiga fase perkembangan ekowisata: fase perintisan, fase berkembang awal, dan fase berkembang penuh. Pada fase perintisan, partisipasi dalam perencanaan sangat bergantung pada kehadiran pendamping eksternal; namun seiring matangnya kelembagaan, komunitas semakin mampu melakukan perencanaan secara mandiri. Model partisipasi berjenjang ini memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami tahap perkembangan Pokdarwis Kereng Bangkirai dan merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Analisis Kebijakan Publik dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Pengelolaan sektor pariwisata yang bersinggungan langsung dengan zonasi konservasi di Indonesia kerap kali tertahan oleh benturan regulasi sektoral dan minimnya harmonisasi kebijakan. Oleh karena itu, kerangka analisis kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan perolehan manfaat ekonomi komersial dengan hukum kelestarian lingkungan hidup. Harefa et al. (2025) menekankan bahwa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan kapasitas lokal, serta kebijakan yang tumpang tindih merupakan tantangan struktural terbesar yang sering menggagalkan pelestarian di kawasan wisata alam. Pada tataran ekosistem gambut, dimensi tata kelola kebijakan menjadi semakin kompleks. Degradasi lahan gambut akibat aktivitas antropogenik menyumbang emisi gas rumah kaca yang sangat masif (Gloria & Djaingsastro, 2026). Karenanya, setiap kebijakan pariwisata di kawasan gambut niscaya harus diintegrasikan dengan kerangka kebijakan iklim nasional. Lebih lanjut, Firman et al. (2023) menyoroti bahwa intervensi kebijakan pariwisata dari pemerintah harus diimplementasikan secara solid dan proaktif agar dampak keberlanjutannya dapat terukur secara signifikan. Realitas kebijakan ini secara langsung relevan bagi tata kelola Dermaga Kereng Bangkirai yang bersinggungan erat dengan Taman Nasional Sebangau.

Tinjauan Penelitian Terdahulu dan *Research Gap*

Dari dimensi tata kelola, Rumangkit et al. (2024) menegaskan bahwa CBET yang efektif mensyaratkan ekosistem tata kelola yang mencakup manajemen lingkungan berbasis ekologi, orientasi kewirausahaan komunitas, serta penerapan teknologi pariwisata. Penelitian ini memperingatkan bahwa upaya pengelolaan wisata tanpa dibarengi kecakapan kelembagaan yang memadai cenderung tidak akan menghasilkan keberlanjutan. Melengkapi temuan tersebut, Saputra (2025) menyoroti konteks pelestarian di Kalimantan Tengah dengan menegaskan bahwa kelangsungan ekowisata gambut sangat bergantung pada keseimbangan dorongan ekonomi masyarakat dan edukasi konservasi jangka panjang.

Pada dimensi partisipasi, Kaharuddin et al. (2020) memetakan pergeseran pola keterlibatan komunitas melintasi tiga fase perkembangan ekowisata, di mana kemandirian warga akan menguat seiring dengan matangnya kelembagaan lokal. Gloria & Djaingsastro (2026) memperdalam perspektif ini dengan membuktikan bahwa pelibatan aktif masyarakat tidak hanya menciptakan lapangan kerja, melainkan juga membangun ketahanan kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari eksploitasi eksternal.

Di ranah regulasi kawasan bernilai ekologis tinggi, Harefa et al. (2025) mengidentifikasi bahwa keberhasilan ekowisata menuntut integrasi kelembagaan yang kuat antara pemerintah, pengelola, dan warga lokal guna mencegah kerusakan lingkungan. Melengkapi argumen ini, Firman et al. (2023) membuktikan bahwa dukungan kebijakan pariwisata ekologis yang proaktif merupakan pilar sentral bagi tercapainya indikator pembangunan hijau di Indonesia.

Tinjauan terhadap keenam penelitian di atas mengungkap kesenjangan yang konsisten: tidak satu pun yang secara bersamaan mengintegrasikan variabel efektivitas kebijakan pemerintah daerah, pola partisipasi masyarakat, dan dampak ekologis terhadap ekosistem gambut tropis dalam satu kerangka analisis terpadu. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mensintesis ketiga dimensi itu secara holistik, menempatkan ekosistem gambut Taman Nasional Sebangau sebagai konteks ekologis utama, guna menghasilkan rekomendasi yang kontekstual bagi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Dermaga Kereng Bangkirai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian kebijakan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Dermaga Kereng Bangkirai bersifat kompleks, multidimensi, dan

membutuhkan sintesis temuan yang konklusif dari berbagai rekam jejak akademis maupun dokumen pemerintahan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna, proses, dan konteks yang melatarbelakanginya (Creswell & Poth, 2018). Studi literatur diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dan berbasis bukti (evidence-based) tanpa harus melakukan observasi lapangan secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Snyder (2019) yang menegaskan bahwa studi literatur terstruktur merupakan metode penelitian primer yang bernilai tinggi dalam menghasilkan pengetahuan dan diagnosis tata kelola baru. Fokus analisis diarahkan secara presisi pada satu rumusan masalah terpadu, yang mencakup kelembagaan kebijakan pemerintah daerah, dinamika partisipasi komunitas (Community-Based Ecotourism/CBET), dan pelestarian ekosistem gambut Taman Nasional Sebangau.

Untuk mengakomodasi pendekatan tersebut, penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada pengumpulan data sekunder yang ditarik dari tiga kategori sumber utama. Pertama, dokumen regulasi dan kebijakan otentik, meliputi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan pariwisata (termasuk Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.423/Kpts-II/2004 serta dokumen RPJMN). Kedua, literatur ilmiah yang terdiri dari artikel jurnal terakreditasi nasional (SINTA) maupun internasional (Scopus). Ketiga, laporan kelembagaan dan publikasi digital, yang dihimpun melalui penelusuran situs web (website) resmi instansi terkait, seperti portal data Badan Pusat Statistik (BPS), rilis laporan Borneo Nature Foundation, serta publikasi resmi Balai Taman Nasional Sebangau dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Kriteria inklusi literatur ditetapkan secara ketat, yakni memiliki relevansi langsung dengan topik tata kelola destinasi ekowisata gambut, berstatus akses terbuka (open access), dan diterbitkan dalam kurun waktu 2020–2026 untuk menjamin kebaruan data, dengan pengecualian pada dokumen regulasi hukum dan teori metodologi dasar.

Proses analisis data dikerjakan melalui dua teknik triangulasi analisis yang saling melengkapi, yakni analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi difungsikan untuk membedah, mengkategorikan, dan menginterpretasikan teks otentik pada dokumen kebijakan guna menilai konsistensi regulasi antara pemerintah daerah dan otoritas kawasan konservasi (Krippendorff, 2004). Sementara itu, analisis tematik diimplementasikan untuk menyarikan temuan dari ragam jurnal ilmiah dengan mengidentifikasi pola permasalahan dan keberhasilan di lapangan. Proses ini mengadaptasi enam tahapan sistematis Braun dan Clarke (2006): familiarisasi data, pembangkitan kode awal,

pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, hingga penyusunan laporan akhir. Demi menjamin validitas dan keabsahan temuan library research ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber daya (source triangulation) secara berlapis dan menjaga objektivitas (confirmability) melalui dokumentasi jejak audit (audit trail) analitis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran, ekstraksi, dan sintesis data dari berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan instansi resmi terkait dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penelitian ini membedah dinamika tata kelola ekowisata di Dermaga Kereng Bangkirai secara multidimensi. Temuan dari studi literatur ini diorganisasikan ke dalam tiga tema utama guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif: (1) evaluasi regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, (2) efektivitas partisipasi komunitas lokal, dan (3) implikasi ekologis terhadap ekosistem gambut Taman Nasional Sebangau.

Analisis Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekowisata

Pengembangan kawasan Dermaga Kereng Bangkirai memperlihatkan adanya tantangan yurisdiksi yang kompleks akibat posisinya sebagai wilayah penyangga (*buffer zone*) Taman Nasional Sebangau. Sintesis terhadap dokumen kebijakan menemukan adanya potensi tumpang tindih (*overlapping*) antara target pendapatan daerah dan mandat konservasi nasional. Secara administratif, Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya mengoptimalkan Kereng Bangkirai sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pariwisata, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lonjakan persisten kunjungan wisatawan ke destinasi ini pascapandemi, menjadikannya salah satu episentrum perputaran ekonomi lokal di Palangka Raya. Namun, di sisi lain, tata kelola ruang air dan daratan di kawasan ini tunduk pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.423/Kpts-II/2004 tentang penetapan Taman Nasional Sebangau. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa harmonisasi kedua regulasi ini belum berjalan optimal. Harefa et al. (2025) dalam kajiannya menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan kebijakan sektoral yang tumpang tindih merupakan akar kegagalan pelestarian di kawasan wisata alam. Di Kereng Bangkirai, distorsi interpretasi regulasi kerap terjadi; pemerintah daerah cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur penunjang aksesibilitas (amenitas) untuk mendongkrak volume kunjungan, sementara otoritas Balai Taman Nasional Sebangau berpegang teguh pada pembatasan aktivitas antropogenik guna menjaga ketat tata ruang konservasi. Ketiadaan

Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara spesifik dan rigid mengatur daya dukung (*carrying capacity*) jumlah maksimal wisatawan per hari di dermaga air hitam menjadi celah kebijakan yang mendesak untuk segera direvisi ulang.

Implementasi Model Ekowisata Berbasis Masyarakat (CBET) dan Dinamika Partisipasi Lokal

Pada dimensi partisipasi akar rumput, literatur mengonfirmasi bahwa model *Community-Based Ecotourism* (CBET) di Kereng Bangkirai telah berhasil menggerakkan roda ekonomi sirkular bagi masyarakat setempat. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) lokal telah memegang kendali atas berbagai unit usaha, mulai dari penyewaan kapal motor (klotok) untuk susur sungai, pengelolaan lapak kuliner, hingga penjualan cenderamata kriya lokal.

Kendati demikian, meminjam kerangka analitis Kaharuddin et al. (2020), tingkat partisipasi masyarakat di Kereng Bangkirai saat ini baru berada pada transisi antara "fase perintisan" menuju "fase berkembang awal". Artinya, keterlibatan komunitas masih didominasi oleh dimensi ekonomi pragmatis (penyediaan jasa/tenaga kerja), namun masih marginal dalam dimensi politik-administratif (pengambilan keputusan strategis). Temuan dari berbagai studi, termasuk telaah oleh Gloria & Djaingsastro (2026), memperingatkan bahwa partisipasi yang sekadar bersifat ekonomi tidak cukup untuk membangun ketahanan komunitas (*community resilience*).

Celah implementasi CBET di kawasan ini terletak pada ruang negosiasi yang belum sepenuhnya inklusif. Kebijakan penataan kawasan oleh pemerintah daerah sering kali bersifat top-down, di mana komunitas lokal diposisikan sebagai "pelaksana teknis" alih-alih "mitra perencana". Padahal, Rumangkit et al. (2024) menegaskan bahwa CBET yang tangguh mensyaratkan ekosistem tata kelola yang memadukan orientasi kewirausahaan warga dengan kelembagaan komunitas yang matang. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dari Dinas Pariwisata berupa program pendampingan (*capacity building*) berkelanjutan yang berfokus pada manajemen mitigasi konflik, standarisasi pelayanan sadar lingkungan, dan literasi hukum konservasi bagi anggota Pokdarwis.

Implikasi Aktivitas Wisata dan Instrumen Mitigasi Kebijakan terhadap Ekosistem Gambut

Dimensi ekologis merupakan temuan paling krusial dalam studi literatur ini. Dermaga Kereng Bangkirai adalah pintu gerbang menuju 568.700 hektare lanskap ekosistem hutan rawa gambut tropika yang menyimpan fungsi sekuestrasi karbon berskala global. Komersialisasi wisata yang tidak dikendalikan oleh instrumen kebijakan berbasis ekologi membawa ancaman laten terhadap keseimbangan hidrologis perairan Sungai Sebangau.

Beberapa literatur empiris memotret adanya dampak antropogenik langsung dari aktivitas susur sungai. Penggunaan kapal motor berbahan bakar fosil secara masif oleh wisatawan tidak hanya berpotensi menimbulkan pencemaran hidrokarbon pada ekosistem air hitam, tetapi juga menghasilkan polusi suara yang mendisrupsi koridor habitat satwa endemik, khususnya orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Lebih lanjut, peningkatan volume sampah domestik dari aktivitas wisata kuliner di sekitar dermaga berisiko mendegradasi kualitas fisik area gambut. Firman et al. (2023) menyoroti bahwa kebijakan pariwisata di area sensitif harus diimplementasikan secara solid dan proaktif. Dalam konteks Kereng Bangkirai, kebijakan pemerintah daerah mutlak harus diintegrasikan dengan agenda iklim nasional, seperti Rencana Operasional Indonesia *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Studi literatur ini menyimpulkan bahwa tata kelola ekowisata berbasis masyarakat di Dermaga Kereng Bangkirai dihadapkan pada tiga tantangan struktural yang saling berkaitan. Pertama, terdapat disharmoni regulasi antara kepentingan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan mandat konservasi ekosistem gambut yang diamanatkan oleh Balai Taman Nasional Sebangau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.423/Kpts-II/2004. Ketiadaan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur daya dukung (*carrying capacity*) kawasan wisata air hitam menjadi celah kebijakan yang mendesak untuk disempurnakan. Kedua, model *Community-Based Ecotourism* (CBET) yang diterapkan baru mencapai tahap transisi antara fase perintisan menuju fase berkembang awal, di mana keterlibatan Pokdarwis masih terbatas pada dimensi ekonomi pragmatis dan belum sepenuhnya menjangkau dimensi pengambilan keputusan strategis. Ketiga, aktivitas wisata yang belum terintegrasi dengan instrumen mitigasi ekologis menimbulkan ancaman laten terhadap fungsi sekuestrasi karbon ekosistem gambut Sungai Sebangau, khususnya melalui pencemaran hidrokarbon dari kapal motor dan gangguan habitat satwa endemik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah intervensi strategis. Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Balai Taman Nasional Sebangau perlu segera merumuskan Peraturan Daerah terpadu yang secara eksplisit mengatur batas maksimal kunjungan harian, zonasi aktivitas wisata, dan standar operasional ramah lingkungan di kawasan Dermaga Kereng Bangkirai. Selain itu, Dinas Pariwisata perlu mengimplementasikan program penguatan kapasitas (*capacity building*) yang berkelanjutan bagi anggota Pokdarwis, yang mencakup literasi hukum konservasi, manajemen wisata sadar

lingkungan, dan kecakapan berwirausaha berbasis komunitas. Di tingkat kebijakan nasional, integrasi antara program ekowisata Dermaga Kereng Bangkirai dengan target Rencana Operasional Indonesia *FOLU Net Sink 2030* perlu diperkuat melalui mekanisme insentif fiskal dan skema pembagian manfaat ekologis yang adil bagi komunitas lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Sebagai studi literatur, temuan yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dan kualitas dokumen akademis yang dapat diakses secara terbuka; observasi lapangan langsung tidak dilakukan sehingga dinamika faktual terkini di lokasi penelitian tidak dapat ditangkap secara real-time. Selain itu, data primer berupa persepsi dan pengalaman langsung dari anggota Pokdarwis, wisatawan, dan aparat pemerintah daerah tidak dihimpun, sehingga dimensi subjektif dari implementasi kebijakan belum sepenuhnya terwakili. Penelitian mendatang sangat disarankan untuk mengadopsi pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi partisipatif, dan pengukuran indikator ekologis secara langsung di lapangan. Kajian komparatif dengan destinasi ekowisata gambut lainnya di Kalimantan juga direkomendasikan guna menghasilkan generalisasi temuan yang lebih kuat dan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024, June 3). *Perkembangan pariwisata April 2024*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/06/03/2351/perkembangan-pariwisata-april-2024.html>
- Balai Taman Nasional Sebangau. (2025). *Kawasan Taman Nasional Sebangau*. <https://tnsebangau.org/>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Firman, A., Moslehpour, M., Qiu, R., Lin, P.-K., Ismail, T., & Rahman, F. F. (2023). The impact of eco-innovation, ecotourism policy and social media on sustainable tourism development: Evidence from the tourism sector of Indonesia. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(2). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2143847>
- Gloria, N. M., & Djaingsastro, A. J. (2026). Dampak restorasi hutan gambut pada lanskap sawit terhadap fungsi ekosistem: Meta-analisis global. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(1), 78–86.
- Harefa, M. S., Kardiana, E., Ar, D. M., Azzahara, N. M., Hafizah, M., & Dach, G. H. J. (2025). Analisis tantangan dalam pengembangan ekowisata pesisir berkelanjutan di Pantai Sri Mersing, Desa Kuala Lama. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4(2), 373–382.
- Kaharuddin, Pudyatmoko, S., Fandeli, C., & Martani, W. (2020). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(1), 42–54.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Rencana operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. <https://www.kehutan.go.id/program/INDONESIA-FOLU-NET-SINK-2030>
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Kristiana, Y., & Nathalia, T. C. (2021). The identification of economic benefits for local communities in the implementation of sustainable tourism in Kereng Bangkirai Tourism Village. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 9(2), 145–153. <https://doi.org/10.36983/japm.v9i2.175>
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik hukum rancangan undang-undang cipta kerja di sektor lingkungan hidup dan kehutanan: Suatu telaah kritis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637–658. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3127>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Purnomo, E. P., Nurmandi, A., Agustiyara, Ramdani, R., Trisnawati, D. W., Rahmasari, F. V., & Ritonga, B. R. (2020). *Ekologi pemerintahan: Bureaucratic inertia dalam alih fungsi lahan memahami dari aras global dan lokal*. Jusuf Kalla School of Government.
- Putri, E. D. H., Yulianto, A., Wardani, D. M., & Saputro, L. E. (2022). Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap ekowisata berbasis masyarakat. 27(3), 317–327.
- Rachmawati, D., & Fitriyani, L. R. (2024). Community participation in developing Penglipuran Village in Bali as tourism village. *Humaniora*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v15i1.11007>
- Rumangkit, S., Pratama, Y. A., Khairi, A., & Hadi, A. S. (2024). Unlocking sustainable ecotourism: Insights from community-based ecotourism (CBET) in Indonesia. *Migration Letters*, 21(5), 645–657.
- Saputra, P. W. (2025). Strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kalimantan Tengah: Tinjauan konseptual dan empiris. *Paryatka: Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan*, 4(1), 33–43.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Waluyo, W. B., Latifah, W. U., Fismasari, Z., & Oktafianti, E. (2025). Peran masyarakat dalam membangun ketahanan masyarakat melalui ekowisata yang sehat dan berkelanjutan. *Action Research Literate*, 9(1), 261–269.